

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan tentu sangat dibutuhkan dalam menciptakan suatu Negara yang baik agar dapat setara dan tidak tertinggal dari Negara lainnya. Dalam melakukan sebuah pembangunan, tentunya suatu Negara membutuhkan dana yang sangat besar. Banyaknya daerah yang ada di Indonesia menjadikan sulitnya pemerintah dalam mengatur pembangunan yang merata di setiap daerah yang terbagi di setiap wilayah. Dalam melaksanakan pembangunan yang merata pemerintah telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah yang dibagi menjadi Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk dapat mengatur dan menjalankan kewenangannya sendiri dengan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah secara langsung.

Pemerintah daerah harus menunjang kegiatan pembangunan pada daerah tersebut, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan dana yang di dapatkan dari daerah dan meminimalisir kebergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu peran Pemerintah Daerah dibutuhkan agar dapat mencukupi biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan yang dijalankan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>1</sup> Dalam hal ini Pendapatan Pajak adalah bentuk pendapatan yang sumbernya berasal dari rakyat dan memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan suatu pembangunan.

Pemerintah Provinsi mengatur beberapa pendapatan yang ada dimana salah satu pendapatan yang diatur ialah pendapatan pajak kendaraan bermotor. Suatu pendapatan pajak yang dalam perhitungannya akan terus bertambah setiap tahunnya adalah pajak kendaraan bermotor. Pertambahan pendapatan pajak kendaraan dikarenakan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan yang wajib dimana saat ini banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor bahkan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Pertambahan tersebut mengakibatkan pada kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang tentu dapat berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tentu terus bertambah pada setiap tahunnya.

Suatu tempat pelayanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di suatu daerah dilakukan pada tempat yang disebut SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Samsat adalah sebuah tempat pelayanan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

---

<sup>1</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. hlm.99

Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi yang dilaksanakan untuk menunjang pelayanan untuk masyarakat.

SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan salah satu cabang tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mencakup pada wilayah Provinsi Jawa Barat. SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan salah satu cabang SAMSAT yang terbagi di wilayah Priangan dan berada di Kota Tasikmalaya. SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan tempat pelayanan untuk membayar pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya berada di Samsat Kota Tasikmalaya. Dengan tujuan membantu pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka Samsat Kota Tasikmalaya melakukan pelayanan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga dapat terwujudnya penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang bertambah dalam setiap tahun.

Dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor tentu sebelumnya tentu ditetapkan target capaian untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya tentu setiap cabang SAMSAT berusaha untuk mencapai target dalam penerimaan pendapatan yang ada. SAMSAT Kota Tasikmalaya tentu juga berusaha agar masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat taat dalam tanggung jawabnya membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan pajak kendaraan bermotor tentu diharapkan dapat terus meningkat.

Pada tahun 2019 seluruh dunia dilanda dengan adanya pandemi *Corona Virus Diales 2019* (Covid-19) yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Dimana keberadaan pandemi covid-19 menjadikan suatu masyarakat harus dapat

melakukan berbagai aktivitas tanpa bertemu orang lain secara langsung. Dampak yang dapat dirasakan oleh adanya hal tersebut adalah terjadinya penurunan kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat. Dalam hal ini terjadi penurunan pada produktivitas dan daya beli masyarakat terhadap suatu hal. Dampak dari adanya pandemi Covid-19 tentunya juga dirasakan pada suatu perusahaan ataupun instansi yang berpijak pada bidang ekonomi dimana pendapatan yang ada tentunya juga menurun.

Penurunan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat tentunya juga mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Akibatnya, terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor saat ini. Dengan adanya peningkatan pada jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang terjadi secara signifikan mencirikan hal tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada capaian target pendapatan daerah sebagaimana yang terjadi pada semester 1 tahun 2022 dimana capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih di bawah 50% (lima puluh persen).

Dalam hal ini pada adapun jumlah potensi kendaraan yang ada di Kota Tasikmalaya sangat besar dimana tingkat potensi kendaraan roda dua di Kota Tasikmalaya mencapai 199.532 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan kendaraan bermotor roda empat adalah 40.906 (empat puluh ribu Sembilan ratus enam) sehingga total dari seluruh kendaraan bermotor yang ada di Kota Tasikmalaya mencapai 240.438 (dua







bermotor yang dimilikinya. Masyarakat lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lainnya. Kemampuan masyarakat untuk membayar PKB dan BBNKB dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Hal ini memicu penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya. Penunggakan tersebut akan berdampak pada peningkatan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana adanya sanksi administratif yang berbentuk denda yang harus dibayarkan pada kendaraan bermotor yang terlambat dalam membayar biaya pajak kendaraan untuk waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menciptakan ketaatan atau kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di tengah pandemi Covid-19, upaya tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat tetap melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Jawa Barat bersama dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Jawa Barat memandang perlunya upaya untuk memberikan relaksasi pajak dengan mengeluarkan sebuah program yaitu “Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022”. Program tersebut merupakan pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda PKB, pengurangan sebagian pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama dan/atau pengurangan sebagian pokok PKB. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dimulai pada awal semester II tahun 2022 yaitu tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Dalam memaksimalkan suatu pembangunan oleh pelaksanaan pemerintah dalam rangka pemulihan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak karena adanya pandemi Covid-19 dan memberikan apresiasi kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum saat jatuh tempo pada semester II tahun 2022 maka pemerintah mengeluarkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 dapat menjadi peluang untuk SAMSAT Kota Tasikmalaya dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan yang diharapkan dapat meningkat.

SAMSAT Kota Tasikmalaya sebagai salah satu cabang tempat pelayanan pembayaran pajak di Kota Tasikmalaya harus berupaya melakukan sosialisasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Kota Tasikmalaya dapat mengetahui informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang dilakukan tentu harus dapat tersebar kepada seluruh masyarakat di Kota Tasikmalaya. Sosialisasi tidak dapat terlepas dari bagaimana cara seseorang yang melakukan sosialisasi tersebut dengan melakukan suatu komunikasi dan komunikasi yang dilakukan dapat dimengerti juga diterima dengan baik penerima komunikasi dapat berupa suatu masyarakat.

Sosialisasi merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku khalayak sasaran terhadap pesan yang disosialisasikan. Sosialisasi juga merupakan bentuk kebiasaan,



keinginan dan adat istiadat.<sup>2</sup> Sosialisasi merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan sesuatu sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dalam upaya pemberian suatu informasi mengenai kabar maupun berita yang ada. Sosialisasi dilakukan kepada sekelompok masyarakat yang ada sehingga individu yang ada pada suatu masyarakat tersebut dapat bereaksi sesuai tuntutan sesuai dengan apa yang disosialisasikan.

Dalam melakukan suatu sosialisasi tentu tidak dapat terlepas dari penggunaan suatu komunikasi tertentu. Komunikasi dapat dijelaskan adalah bentuk penyampaian informasi, ide maupun gagasan dari seseorang kepada seorang lainnya menggunakan media tertentu dan menimbulkan efek tertentu. Dengan adanya komunikasi diharapkan dapat terjadinya suatu pemahaman mengenai suatu informasi yang ada. Dalam hal ini komunikasi digunakan sebagai cara untuk penyampaian sosialisasi yang dilakukan dimana komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi kepada masyarakat.

Profesor Wilbur Schram menjelaskan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.<sup>3</sup> Dalam hal ini sikap dalam masyarakat yang ada dapat terbentuk dari komunikasi yang digunakan dalam suatu masyarakat tersebut. Komunikasi memegang peranan penting dalam

---

<sup>2</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar—Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009) cet I, 95

<sup>3</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1-2.

masyarakat sehingga terciptanya pemikiran masyarakat dapat terbentuk akibat komunikasi.

Komunikasi dikatakan berjalan baik jika suatu pemahaman dari suatu penerima komunikasi tersebut sesuai dengan suatu informasi yang diinformasikan. Dalam hal ini untuk mengelola suatu komunikasi yang baik harus dilakukan komunikasi yang efektif. Dalam menyusun komunikasi yang baik tentu diutuhkan suatu strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan sebuah program harus mencakup tiga unsur penting agar komunikasi berjalan efektif, yaitu mulai dari daya tarik dan kredibilitas komunikator, karakteristik pesan, serta media yang dipilih dan digunakan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan sosialisasi tentu harus dibarengi dengan penggunaan komunikasi yang baik juga efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi komunikasi dari SAMSAT Kota Tasikmalaya kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. SAMSAT Kota Tasikmalaya sebagai instansi terkait perlu untuk melakukan komunikasi sosialisasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 untuk menciptakan pengertian kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Sosialisasi harus dilakukan dengan berbagai cara agar informasi yang ada dapat tersampaikan dan diketahui oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sosialisasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai cara. Masyarakat yang ada di

---

<sup>4</sup> Ayu Susanti Herdiana. "Strategi Komunikasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)". Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol 2 No 4 (Januari, 2015): 243-254. Diakses pada 2 Oktober 2022.

Kota Tasikmalaya tersebar yang menjadikan sosialisasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dan dapat mencangkup seluruh masyarakat di Kota Tasikmalaya. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dan dengan menggunakan bantuan media tertentu. Keberhasilan dari sosialisasi yang dilakukan dapat berpengaruh terhadap target pendapatan yang akan dicapai oleh Samsat Kota Tasikmalaya. Dengan sosialisasi yang baik masyarakat dapat mengetahui mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan menimbulkan keinginan untuk mengikuti program yang ada.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

“Bagaimana sosialisasi yang dilakukan pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 oleh Samsat Kota Tasikmalaya?.”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

Untuk mengetahui sosialisasi pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 oleh Samsat Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan dalam membuktikan kelayakan aplikasi pada konsep yang digunakan, dan dapat berkontribusi pada perluasan pengetahuan berkat kerangka konsep yang digunakan.

## 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran baru tentang keilmuan pengetahuan untuk para mahasiswa terlebih pada jurusan ilmu komunikasi mengenai komunikasi sosialisasi.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Samsat Kota Tasikmalaya, dapat menjadi evaluasi mengenai sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 dan menjadi rujukan untuk sosialisasi program lainnya.
- b. Bagi Masyarakat, dapat menjadikan sumber rujukan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 di Samsat Kota Tasikmalaya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk dapat membantu penulis dalam menjelaskan mekanisme dan berbagai tahapan yang terkandung dalam suatu proses penulisan agar dapat disusun dengan sistematis dan terperinci. Adapun sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini antara lain:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang dari masalah yang diteliti. Dalam pembuatan latar belakang berisi mengenai masalah-masalah yang terjadi dan menjadi dasar dari penelitian ini tentunya dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya dari latar belakang tersebut

dibuatkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian terdahulu berisi mengenai penelitian yang serupa yang telah dilakukan peneliti lain dan digunakan sebagai tolak ukur untuk melakukan penelitian ini. Konsep digunakan untuk memudahkan penyajian data dan permasalahan dalam penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode dan tahapan-tahapan untuk dilakukan dalam penelitian. Metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Serta dijelaskan juga lokasi dan jadwal penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian yang berupa wawancara peneliti dengan subjek penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjabarkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan pada pihak terkait.

